



Katalog: 4102004.21
ISSN 2442-6199

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Kepulauan Riau 2023

Volume 12, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Katalog: 4102004.21
ISSN 2442-6199

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Kepulauan Riau 2023

Volume 12, 2023

<https://kepri.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Kepulauan Riau 2023

Volume 12, 2023

Katalog : 4102004.21
ISSN : 2442-6199
No. Publikasi : 21000.2338

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 96 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dicetak Oleh:

CV. Bintang Printing

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, pexels.com

Dilarang memproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Tim Penyusun

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Kepulauan Riau 2023

Volume 12, 2023

Pengarah

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab

Purwo Astono, SST

Penyunting

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si

Utary Hafiza, SST

Fenny Afifatul Awwaliyah, SST

Indrasti Putri Utami Batubara, A.Md

Penata Letak

Arnold Alfredy, SST, M.Sc

Utary Hafiza, SST

Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau 2023 merupakan publikasi yang disajikan secara berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan tingkat kesejahteraan rakyat Provinsi Kepulauan Riau antarwaktu serta perbandingannya antarkabupaten/kota atau antardaerah perkotaan dan perdesaan.

Data yang digunakan sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus.

Publikasi ini mencakup beberapa aspek diantaranya kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan sosial budaya.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna data. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian publikasi ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Tanjungpinang, November 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Riau



Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Daftar Isi

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Kepulauan Riau 2023

Volume 12, 2023

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
1. Kependudukan	1
1.1 Pendahuluan.....	3
1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	4
1.3 Distribusi Penduduk	5
1.4 Komposisi Penduduk.....	6
2. Kesehatan dan Gizi.....	9
2.1 Pendahuluan.....	11
2.2 Derajat dan Kesehatan Penduduk.....	12
2.3 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	19
2.4 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	21
3. Pendidikan	23
3.1 Pendahuluan.....	25
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	26
3.3 Tingkat Pendidikan	28
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	29
3.5 Kualitas Layanan Pendidikan	31

4. Ketenagakerjaan	35
4.1 Pendahuluan.....	37
4.2 Angkatan Kerja	38
4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	39
4.4 Penduduk yang Bekerja	40
4.5 Tingkat Pengangguran	44
5. Taraf dan Pola Konsumsi	49
5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	51
5.2 Konsumsi Kalori dan Protein	54
6. Perumahan dan Lingkungan.....	57
6.1 Pendahuluan.....	59
6.2 Kualitas Rumah Tinggal.....	60
6.3 Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah.....	62
7. Kemiskinan	67
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin.....	69
7.2 Garis Kemiskinan.....	70
7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	74
8. Sosial Lainnya	77
8.1 Pendahuluan.....	79
8.2 Perlindungan Sosial.....	79
8.3 Akses terhadap Informasi.....	79
8.4 Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga.....	81
8.5 Tindak Kejahatan.....	82
Daftar Pustaka.....	87
Lampiran	89

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2020, 2022, dan 2023.....	4
Tabel 1.2	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2023	6
Tabel 1.3	Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, 2023.....	7
Tabel 2.1	UHH saat Lahir Menurut Provinsi di Wilayah Pulau Sumatera (tahun), 2020-2023	14
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2022 dan 2023.....	17
Tabel 2.3	Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	20
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	22
Tabel 5.1	Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau, 2023.....	52
Tabel 5.2	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, 2022 dan 2023	55
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	61
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Pokok Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2023.....	64

Tabel 7.1	Garis Kemiskinan Makan dan Bukan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021-Maret 2023.....	71
Tabel 7.2	Daftar Komoditi Berdasarkan Sumbangan terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen) di Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2023	72
Tabel 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021-Maret 2023.....	75
Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	80
Tabel 8.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	82
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	83
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga yang Pernah dan Tidak Pernah Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	84
Tabel 8.5	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2023..	86

Daftar Gambar

Gambar 1	Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau (ribu jiwa), 2023	8
Gambar 2.1	Perkembangan UHH saat Lahir Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau (tahun), 2020-2023.....	13
Gambar 2.2	Rata-rata Perkembangan UHH saat Lahir per Tahun Menurut Provinsi di Wilayah Pulau Sumatera (persen), 2020-2023.....	15
Gambar 2.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2022-2023	16
Gambar 2.4	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan (Angka Kesakitan) selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2022-2023	18
Gambar 2.5	Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	19
Gambar 3.1	HLS dan RLS Provinsi Kepulauan Riau (tahun), 2018-2023	28
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Kepulauan Riau, 2023	29
Gambar 3.3	APS Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (persen), 2022-2023	30
Gambar 3.4	APM Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2022-2023	31
Gambar 3.5	Rasio Murid Guru di Provinsi Kepulauan Riau (persen), 2022/2023	33

Gambar 4.1	Angkatan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2023.....	39
Gambar 4.2	TPAK di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2021-Agustus 2023	40
Gambar 4.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2022 - Agustus 2023.....	42
Gambar 4.4	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Riau (orang), Agustus 2022 dan Agustus 2023.....	43
Gambar 4.5	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu (Pekerja Penuh dan Tidak Penuh) di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2022 dan Agustus 2023.....	44
Gambar 4.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (orang), Agustus 2022 dan Agustus 2023.....	45
Gambar 4.7	TPT Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2022 dan Agustus 2023.....	47
Gambar 5.1	Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kuartil (persen), 2023	53
Gambar 5.2	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2019-Maret 2023.....	54
Gambar 7	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2017-Maret 2023	70
Gambar 8	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Jenis Kredit di Provinsi Kepulauan Riau, 2023.....	85



BAB 1

Kependudukan



58,38%

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
berada di **Kota Batam**

Bab 1

Kependudukan

1.1 Pendahuluan

Penduduk dalam pembangunan mempunyai peran sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objek). Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas seperti mengurangi jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran, dan menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua penduduk.

Kondisi kependudukan saat ini akan mempengaruhi dinamika pembangunan ke depan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama setahun terakhir (2022-2023), laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,47 persen. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau cukup bervariasi. Kota Batam dengan LPP tertinggi bahkan melebihi LPP provinsi, yaitu sebesar 1,67 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bintan dengan LPP sebesar 1,42 persen. Sedangkan LPP terendah yaitu Lingga sebesar 1 persen. Pertumbuhan penduduk Kota Batam yang tinggi tersebut disebabkan oleh migrasi masuk penduduk dari luar Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk bekerja, mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2020, 2022, dan 2023

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu jiwa)			LPP (persen)	
	2020	2022	2023	2020-2023	2022-2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	253,46	257,80	260,60	0,93	1,09
Bintan	159,52	163,56	165,89	1,31	1,42
Natuna	81,50	83,43	84,56	1,24	1,35
Lingga	98,63	100,03	101,03	0,80	1,00
Kep. Anambas	47,40	48,44	49,09	1,17	1,34
Batam	1.196,40	1.236,01	1.256,61	1,65	1,67
Tanjungpinang	227,66	232,20	234,84	1,04	1,14
Kepulauan Riau	2.064,56	2.121,48	2.152,63	1,40	1,47

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Proyeksi Penduduk Hasil SP2020

1.3 Distribusi Penduduk

Distribusi Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau sangat tidak merata antar kabupaten/kota. Lebih dari separuh penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, yaitu sebesar 58,38 persen pada tahun 2023. Kondisi yang sangat berkebalikan yaitu jumlah penduduk di Kabupaten lainnya sedikit. Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna, dan Lingga masing-masing hanya sebesar 2,28 persen, 3,93 persen, dan 4,69 persen (Tabel 1.2).

Bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kedua kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan ternyata kepadatan penduduk Kota Tanjungpinang lebih tinggi dibandingkan Kota Batam, yaitu mencapai 1.561,75 jiwa per km². Sementara itu, Kabupaten Lingga dan Natuna yang merupakan dua kabupaten terluas di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 45,70 jiwa per km² dan 42,30 jiwa per km².

Tabel 1.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (km ²)	Penduduk (ribu jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ² (jiwa/ km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	930,45	260,60	12,11	280,08
Bintan	1.317,15	165,89	7,71	125,95
Natuna	1.999,16	84,56	3,93	42,30
Lingga	2.210,82	101,03	4,69	45,70
Kep. Anambas	627,03	49,09	2,28	78,29
Batam	1.034,73	1.256,61	58,38	1.214,43
Tanjungpinang	150,37	234,84	10,91	1.561,75
Kepulauan Riau	8.269,71	2.152,63	100,00	260,30

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Hasil SP2020

1.4 Komposisi Penduduk

Beberapa permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin perlu selalu diperhatikan perkembangannya. Informasi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan berapa besar jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Di sisi lain, informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan gambaran berapa jumlah penduduk yang termasuk dalam penduduk golongan tua dan golongan muda. Informasi-informasi tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah para *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada.

Tabel 1.3 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)			Sex Ratio
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P	
	(1)	(2)	(3)	
Karimun	133,68	126,92	260,60	105,33
Bintan	85,39	80,51	165,89	106,06
Natuna	43,48	41,08	84,56	105,84
Lingga	52,27	48,75	101,03	107,22
Kep. Anambas	25,39	23,70	49,09	107,13
Batam	636,28	620,34	1.256,61	102,57
Tanjungpinang	118,60	116,25	234,84	102,02
Kepulauan Riau	1.095,09	1.057,54	2.152,63	103,55

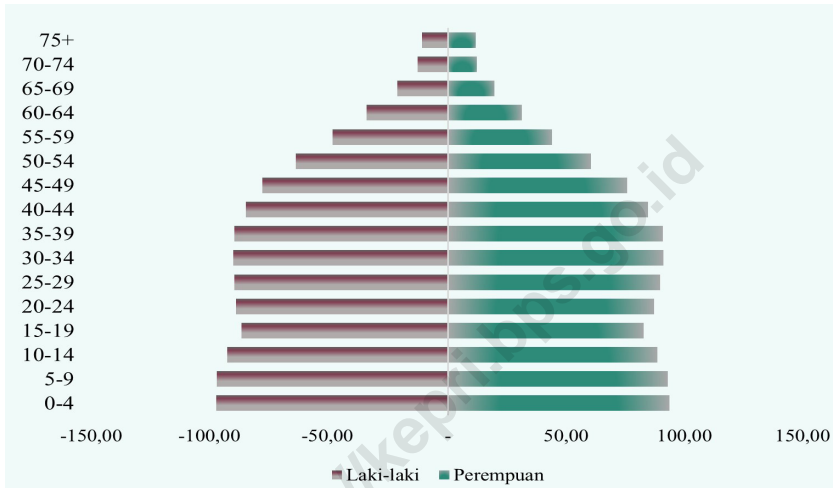
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Hasil SP2020

a Sex Ratio

Sex ratio penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 103,55. Artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan ada 103 sampai 104 penduduk laki-laki. Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa *sex ratio* di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau lebih dari 100 atau dapat diartikan bahwa di setiap kabupaten/kota terdapat penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

b Piramida Penduduk

Gambar 1 Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau (ribu jiwa), 2023



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Hasil SP2020

Sebagian besar penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong penduduk usia muda yaitu usia sekitar 0-39 tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan piramida yang mengerucut ke atas atau biasa disebut piramida ekspansif (Gambar 1).



BAB 2

Kesehatan dan Gizi



28,18%

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
berobat jalan ke **Klinik/Praktek
Dokter Bersama**

Bab 2

Kesehatan dan Gizi

2.1 Pendahuluan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu, aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

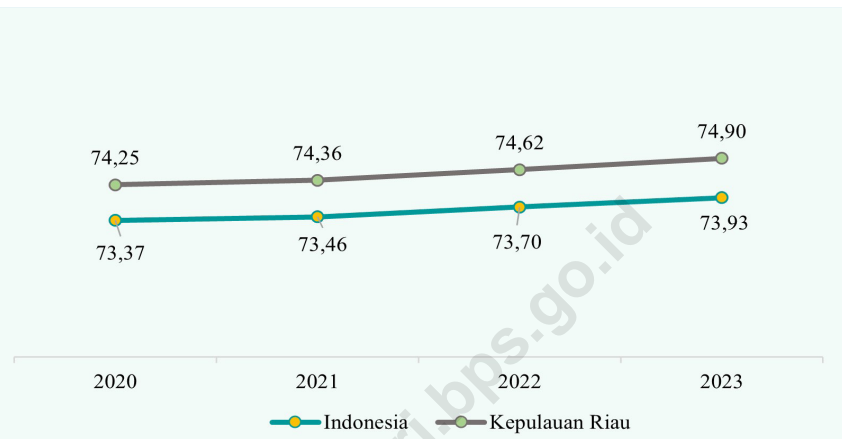
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas kehidupan, usia harapan hidup serta mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Target grup pembangunan kesehatan lebih ditekankan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat tertinggal. Untuk itu, peran serta masyarakat terus ditingkatkan melalui pengelolaan kesehatan terpadu, termasuk dunia usaha. Secara kuantitas dan kualitas, penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat juga terus ditingkatkan.

Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi hambatan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan dengan Program Askeskin yang berlaku sejak 1 Januari 2005. Program ini bertujuan agar akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.

2.2 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Guna meningkatkan kualitas data, pada tahun 2023, BPS melakukan *updating* sumber data UHH hasil SP2010 dengan hasil LF SP2020 yang menyediakan data parameter kependudukan terbaru. Hal ini dengan mempertimbangkan perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir.

Gambar 2.1 Perkembangan UHH saat Lahir Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau (tahun), 2020-2023



Sumber: BPS, Sensus dan Survei Kependudukan (diolah)

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir selama tahun 2020-2023 atau selama empat tahun terakhir Indonesia terus mengalami peningkatan dari 73,37 tahun pada 2020 menjadi 73,93 tahun di 2023. Demikian halnya dengan UHH Kepulauan Riau yang sebesar 74,25 tahun pada 2020 secara berturut-turut mengalami kenaikan hingga mencapai 74,90 tahun pada 2023. Selama tahun 2020-2023, UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,65 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29 persen per tahun.

Pada periode 2020-2023, UHH saat lahir Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Diperkirakan bayi yang lahir pada tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau rata-rata dapat hidup sampai usia 74,90 tahun

Tabel 2.1 UHH saat Lahir Menurut Provinsi di Wilayah Pulau Sumatera (tahun), 2020-2023

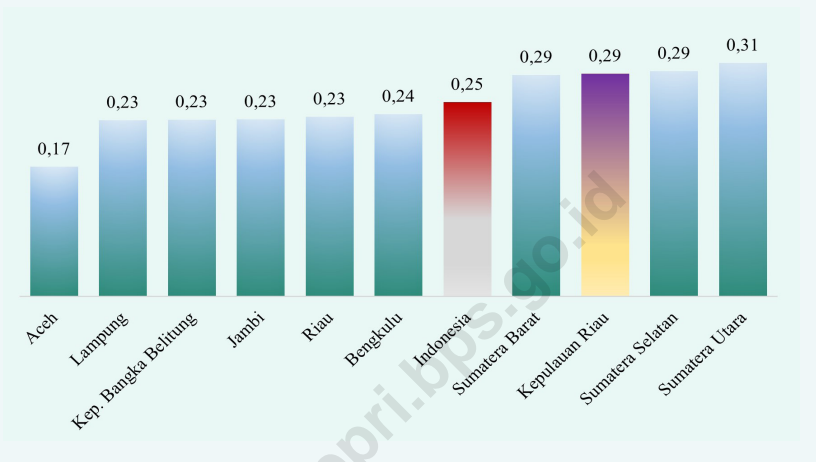
Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	72,69	72,71	72,92	73,06
Sumatera Utara	73,00	73,10	73,39	73,67
Sumatera Barat	73,50	73,60	73,88	74,14
Riau	73,66	73,72	73,95	74,18
Jambi	73,33	73,38	73,61	73,84
Sumatera Selatan	73,39	73,47	73,76	74,04
Bengkulu	72,59	72,65	72,90	73,11
Lampung	73,66	73,73	73,95	74,17
Kep. Bangka Belitung	73,39	73,47	73,68	73,90
Kep. Riau	74,25	74,36	74,62	74,90
Indonesia	73,37	73,46	73,70	73,93

Sumber: BPS, Sensus dan Survei Kependudukan (diolah)

dengan catatan bila diasumsikan bahwa kondisi kesehatan dan kematian yang ada akan berjalan seperti pada saat ini (tidak berubah). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Jika dilihat pada Tabel 2.1, yaitu UHH saat lahir menurut provinsi di wilayah Pulau Sumatera selama periode 2020-2023 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan tahun 2022, laju peningkatan UHH saat lahir masing-masing provinsi di Pulau Sumatera cukup bervariasi yaitu antara 0,19 persen sampai dengan 0,38 persen. Sementara jika dibandingkan periode 2020-2023, laju peningkatan UHH berkisar 0,17 persen hingga

Gambar 2.2 Rata-rata Perkembangan UHH saat Lahir per Tahun Menurut Provinsi di Wilayah Pulau Sumatera (persen), 2020-2023



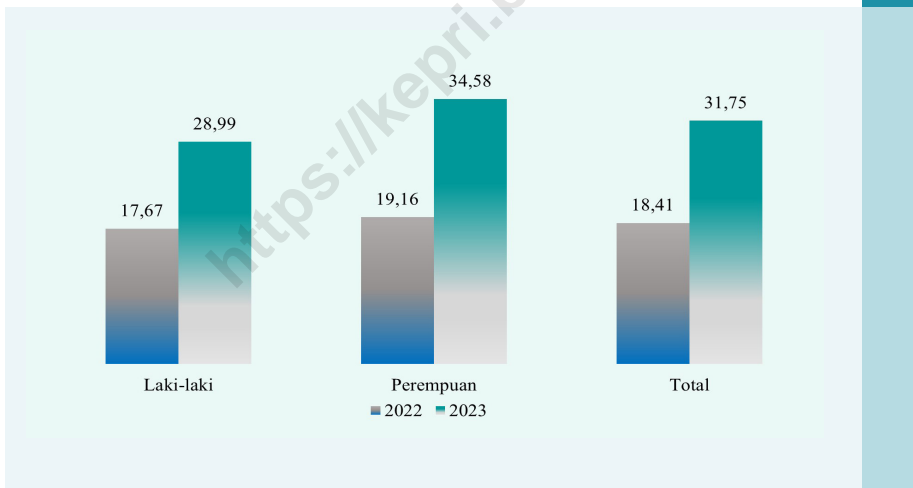
Sumber: BPS, Sensus dan Survei Kependudukan (diolah)

0,31 persen. Laju peningkatan UHH saat lahir tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama.

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.2, terlihat bahwa Provinsi Aceh dengan UHH saat lahir terendah di Pulau Sumatera ternyata juga memiliki rata-rata perkembangan UHH saat lahir per tahun yang lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara, rata-rata perkembangan UHH saat lahir per tahun Provinsi Kepulauan Riau sama dengan 2 provinsi lainnya yaitu Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Ketiga provinsi ini memiliki rata-rata perkembangan UHH saat lahir per tahun yang lebih tinggi dari Indonesia yang sebesar 0,25 persen per tahun.

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang selama sebulan sebelum pencacahan Susenas 2023 mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sebelum melihat angka kesakitan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2022-2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan 2023

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 31,75 persen penduduk mempunyai keluhan kesehatan. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 18,41 persen.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2022-2023

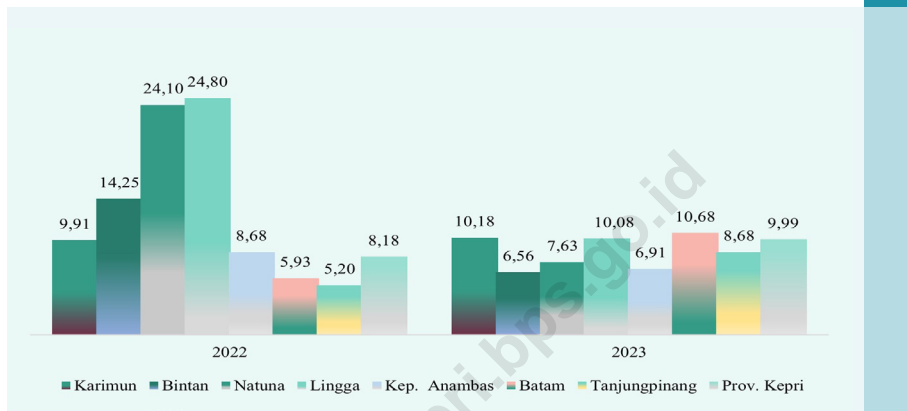
Kabupaten/ Kota (1)	2022			2023		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)	Laki-laki (5)	Perempuan (6)	Total (7)
Karimun	18,35	24,13	21,18	20,01	25,07	22,49
Bintan	24,66	27,24	25,92	15,76	16,63	16,19
Natuna	33,61	37,49	35,50	15,37	14,76	15,08
Lingga	36,37	40,38	38,32	19,47	20,72	20,08
Kep. Anambas	19,56	18,57	19,08	12,25	15,57	13,86
Batam	14,78	15,53	15,15	33,84	40,94	37,35
Tanjungpinang	18,21	19,04	18,62	25,22	27,18	26,19
Kep. Riau	17,67	19,16	18,41	28,99	34,58	31,75
Indonesia	28,46	31,44	29,94	24,66	27,88	26,27

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan 2023

Berdasarkan jenis kelamin, di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mempunyai keluhan kesehatan, dimana untuk penduduk laki-laki sebesar 28,99 persen dan penduduk perempuan sebesar 34,58 persen (kondisi tahun 2023). Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan baik laki-laki maupun perempuan.

Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, terlihat pada Tabel 2.2 bahwa tingkat keluhan kesehatan antarkabupaten/kota bervariasi. Pada tahun 2023, kabupaten/kota dengan banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi

Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan (Angka Kesakitan) selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2022-2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan 2023

yaitu Kota Batam, bahkan persentasenya melebihi Provinsi Kepulauan Riau yaitu 37,35 persen. Adapun yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 13,86 persen.

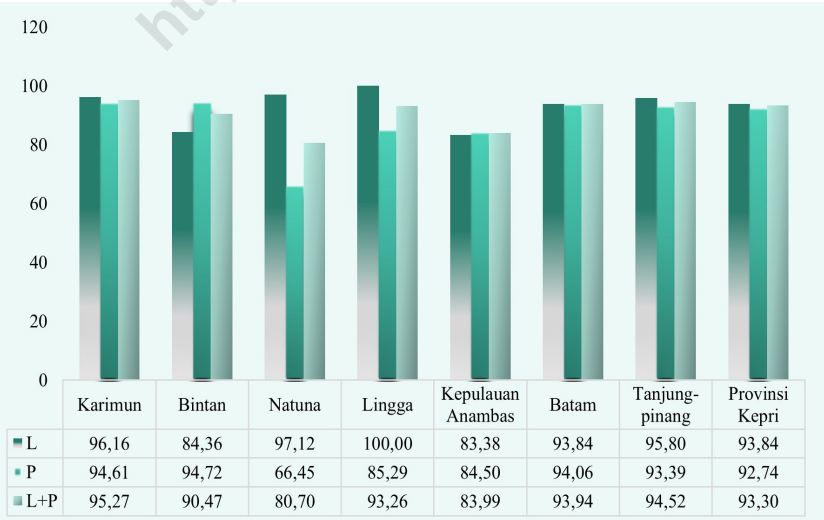
Secara umum, pada tahun 2023 persentase penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki di semua kabupaten/kota kecuali Kabupaten Natuna. Sementara itu, pada tahun 2022 persentase penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan adalah Kabupaten Kepulauan Anambas

Indikator kesehatan berikutnya yang membutuhkan perhatian khusus yaitu angka kesakitan. Jika dibandingkan dengan

tahun 2022 (Gambar 2.4), Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas mengalami penurunan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan. Adapun kabupaten/kota lainnya termasuk Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 9,99 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami keluhan kesehatan hingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Kota Batam menjadi kabupaten dengan persentase angka kesakitan tertinggi tahun 2023, yaitu sebesar 10,68 persen.

2.3 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Gambar 2.5 Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Salah satu faktor penting pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi, selain itu juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit.

Tabel 2.3 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/ Rubela- (MR)	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	83,51	82,03	77,52	67,82	76,75
Bintan	80,16	74,13	74,74	65,91	70,81
Natuna	80,49	77,48	73,67	66,17	74,85
Lingga	80,50	76,06	75,97	63,50	74,24
Kep. Anambas	69,25	64,93	66,00	55,13	63,41
Batam	86,27	83,96	86,60	77,84	87,04
Tanjungpinang	83,76	79,01	76,22	74,96	76,54
Kep. Riau	84,95	82,21	83,54	75,13	83,54

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa sekitar 93,30 persen bayi usia di bawah 2 tahun (baduta) di Provinsi Kepulauan Riau pernah diberi ASI. Terdapat 3 kabupaten/kota dengan persentase baduta laki-laki dan perempuan pernah diberi ASI lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi, yaitu Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Jika diulas berdasarkan jenis kelamin, baduta laki-laki cenderung lebih banyak yang pernah mendapatkan ASI dibandingkan baduta perempuan di sebagian

besar kabupaten/kota. Bahkan seluruh (sebesar 100 persen) baduta laki-laki di Kabupaten Lingga pernah mendapatkan ASI.

Untuk mencegah berbagai penyakit menular, pemerintah memberikan beberapa antigen untuk balita dan anak-anak. Adapun antigen yang dianggap penting adalah BCG, Polio, DPT, dan Campak untuk mencegah penyakit yang biasanya menyerang anak-anak yang diduga dapat menyebabkan kematian pada bayi. Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa balita di Provinsi Kepulauan Riau yang pernah diberikan imunisasi campak masih di bawah 80 persen.

2.4 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal dimana mereka berada. Berdasarkan Tabel 2.4, diketahui bahwa penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 lebih banyak yang berobat jalan ke klinik/praktik dokter bersama, yaitu sebesar 28,18 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2023 penduduk Kota Batam yang mayoritas tinggal di daerah perkotaan lebih banyak berobat jalan ke rumah sakit swasta (26,63 persen) dan klinik/praktek dokter bersama (33,67 persen). Sementara itu, di Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang lebih dari 40 persen berobat ke puskesmas/pustu.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	21,45	7,62	27,16	11,92
Bintan	25,85	2,98	16,82	9,07
Natuna	24,76	4,96	6,90	10,71
Lingga	11,51	0,00	13,81	7,11
Kep. Anambas	16,56	2,57	6,24	29,74
Batam	10,71	26,63	15,16	33,67
Tanjungpinang	22,84	3,37	17,29	15,61
Kep. Riau	13,53	20,81	16,10	28,18

Tabel 2.4 (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Batra/ Alternatif	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Karimun	34,78	3,68	0,34	3,03
Bintan	42,27	4,59	6,32	0,00
Natuna	40,60	9,66	2,68	0,00
Lingga	43,25	24,69	0,00	0,00
Kep. Anambas	46,94	2,25	0,99	0,00
Batam	17,39	0,75	1,59	0,09
Tanjungpinang	41,49	0,26	0,26	0,00
Kep. Riau	23,26	1,98	1,57	0,30

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023



BAB 3

Pendidikan





12,96%

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
berpendidikan **DIV/S1/S2/S3**

Bab 3

Pendidikan

3.1 Pendahuluan

Pembangunan pendidikan sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, pendidikan, efisiensi manajemen, pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dibarengi dengan perbaikan sistem pendidikan. Gerakan wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7-15 tahun merupakan salah satu bentuk dari usaha yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya program wajib belajar diharapkan mampu meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak usia pendidikan dasar, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sama halnya di bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan pun terdapat kesenjangan, walau tidak terlalu jelas seperti bidang kesehatan. Hasil pendidikan sampai sejauh jenjang tertentu akan tergantung pada pengaruh keluarga, khususnya tingkat

pendidikan orang tua dan pada ada tidaknya tekanan bagi anak untuk lekas meninggalkan bangku sekolah agar dapat bekerja.

Di samping itu, penancangan program wajib belajar tersebut juga diikuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana fisik yang menunjang kegiatan belajar mengajar seperti didirikannya sekolah-sekolah baru baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, atau berupa program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Telah beberapa tahun pemerintah mengadakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari usaha pemerintah dalam upaya mengurangi angka putus sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bidang pendidikan, maka alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau ke sektor pendidikan nilainya mencapai 20 persen sejak tahun 2007.

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

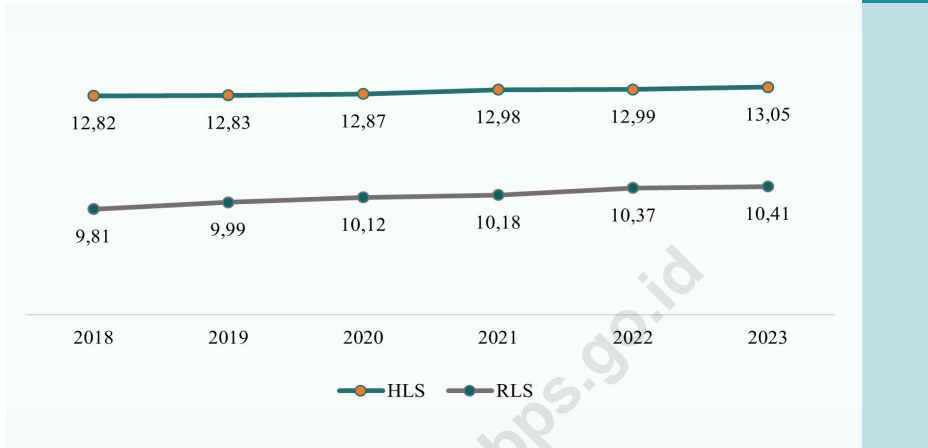
Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan

yang layak semakin terbuka lebar. Dimensi pendidikan dapat digambarkan melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)*. Kedua indikator tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023, harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,06 tahun atau tumbuh sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun 2022. Selama lima tahun terakhir (periode 2018 hingga 2023), harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,36 persen per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai 13,05 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah hingga 13,05 tahun atau setara dengan menduduki bangku kuliah Diploma I.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 meningkat 0,04 tahun atau tumbuh sebesar 0,39 persen dibandingkan tahun 2022. Selama lima tahun terakhir, RLS secara rata-rata tumbuh sebesar 1,2 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai 10,41 yang berarti secara rata-rata penduduk Provinsi Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X hingga XI di tingkat SMA/ sederajat.

Gambar 3.1 HLS dan RLS Provinsi Kepulauan Riau (tahun), 2018-2023

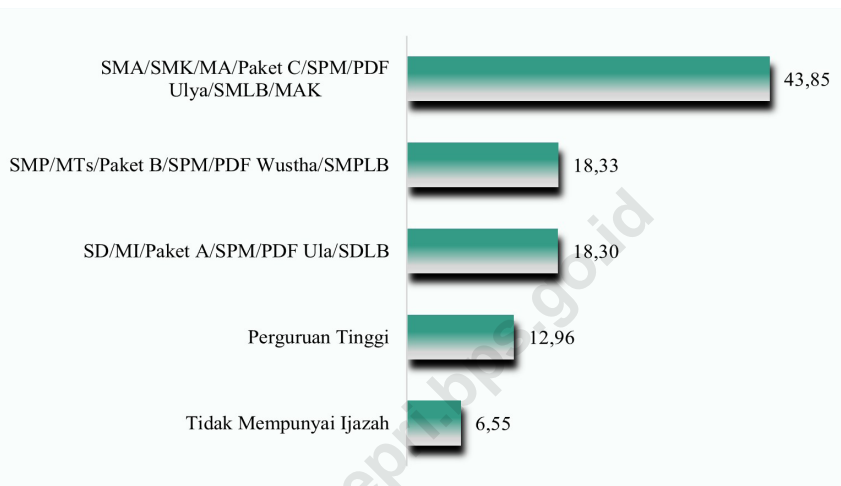


Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2023

3.3 Tingkat Pendidikan

Komitmen 20 persen anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk pendidikan, tercermin dari kondisi pendidikan di tahun 2023. Gambaran mengenai mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Terlihat pada Gambar 3.2, persentase terbesar penduduk Provinsi Kepulauan Riau usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki adalah tamat SMA sebesar 43,85 persen. Sementara itu, masih ada penduduk yang tidak mempunyai ijazah sama sekali yaitu sebesar 6,55 persen.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Kepulauan Riau, 2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menggambarkan berapa banyak penduduk yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan biasanya disebabkan oleh sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pada Gambar 3.3 terlihat gambaran mengenai APS penduduk usia 7-18 tahun menurut kelompok usia sekolah di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa APS di Provinsi Kepulauan Riau selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan pada seluruh kelompok usia. Pada usia sekolah dasar (7-12 tahun) APS tahun 2023 sebesar 99,29 persen, naik dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yang sebesar 99,28 persen. APS penduduk usia SLTP (13-15 tahun) lebih rendah dibandingkan APS penduduk usia SD, yaitu sebesar 99,07 persen, APS ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 99,01 persen. Untuk APS penduduk usia SLTA (16-18 tahun) juga meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 84,54 persen menjadi 84,97 persen.

Gambar 3.3 APS Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (persen), 2022-2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022-2023

Selain indikator APS, juga digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yang bervariasi antara golongan umur.

Berdasarkan Gambar 3.4, terlihat bahwa APM di semua kelompok usia sekolah, baik SD, SMP dan SMA di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

Gambar 3.4 APM Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (persen), 2022-2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022-2023

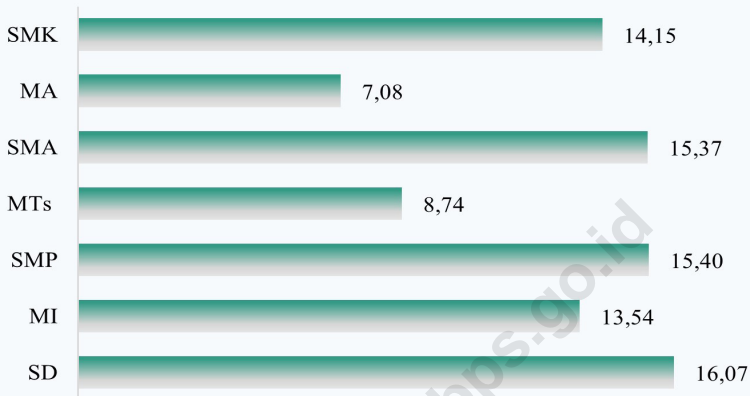
3.5 Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator pendidikan yang lain yang tak kalah pentingnya adalah kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan tersedianya tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas. Indikator yang dapat melihat gambaran tersebut adalah rasio murid terhadap guru.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Syarat Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada pasal 3 antara lain menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah jumlah siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) per kelas antara 30-40 siswa. Begitu juga dengan standar pelayanan minimal pada pendidikan menengah pada pasal 4 menyebutkan bahwa jumlah siswa SMA/Madrasah Aliyah (MA) per kelas antara 30-40 siswa.

Sementara itu, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut: SD sebesar 20:1; MI sebesar 15:1; SMP sebesar 20:1; MTs sebesar 15:1; SMA sebesar 20:1; MA sebesar 15:1; dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 15:1. Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini akan efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan yang berarti bahwa tahun 2016 telah mutlak diberlakukan.

Gambar 3.5 Rasio Murid Guru di Provinsi Kepulauan Riau, 2022/2023



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, Data Semester Ganjil TA 2022/2023

Pada Gambar 3.5, diketahui bahwa pada tahun 2022/2023 rasio murid terhadap guru pada seluruh jenjang pendidikan di bawah Kemendikbud di Provinsi Kepulauan Riau belum memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004. Begitu juga halnya dengan PP Nomor 74 Tahun 2008, belum memenuhi standar rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya. Kondisi yang belum memenuhi standar tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyak sekolah-sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di pulau-pulau kecil dimana jumlah penduduknya relatif sedikit.



<http://pri.bps.go.id>

BAB 4

Ketenagakerjaan





pri.bps.go.id

25,23%

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
bekerja di **Sektor Industri Pengolahan**

Bab 4

Ketenagakerjaan

4.1 Pendahuluan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada

masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan mempengaruhi output produksi.

Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah berusia 15 tahun ke atas. Manakala seseorang tersebut terlibat dalam suatu pekerjaan atau terkategori sebagai pengangguran, maka seseorang itu termasuk dalam angkatan kerja. Yang dimaksud dengan pengangguran di sini ialah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

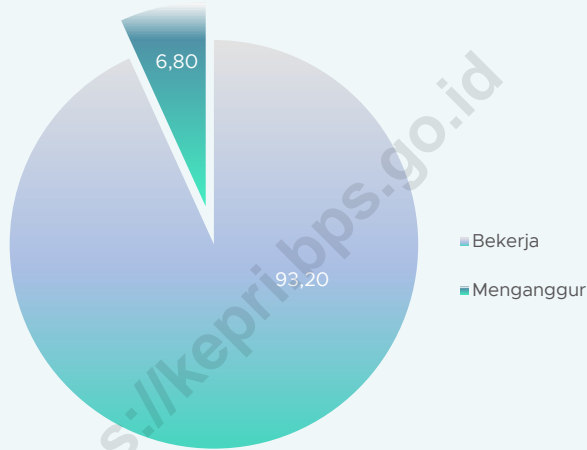
Informasi ketenagakerjaan disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga dan dilaksanakan secara semesteran (Februari dan Agustus).

4.2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1.592.462 orang. Adapun penduduk usia kerja yang bekerja (Angkatan Kerja) pada Agustus 2023 sebanyak 1.093.686 orang. Dari

total angkatan kerja tersebut, 1.019.356 orang (93,20 persen) bekerja dan 74.330 orang atau (6,80 persen) menganggur.

Gambar 4.1 Angkatan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

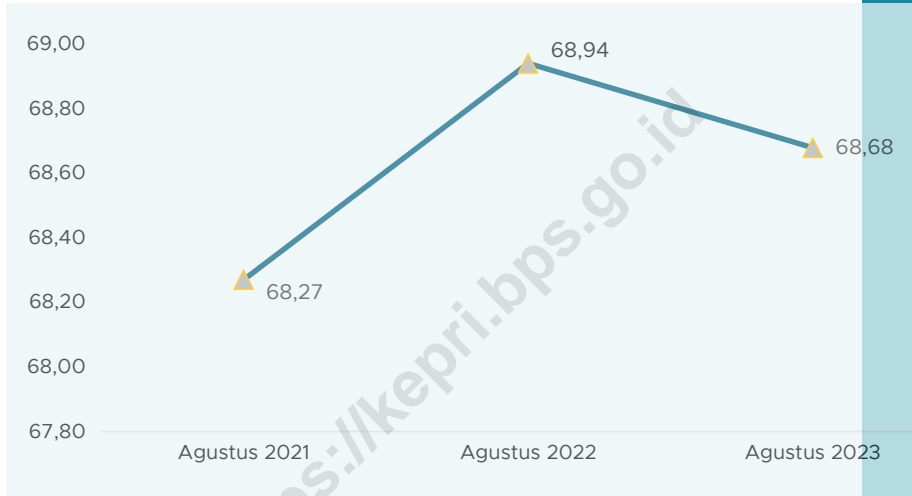
4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan Sakernas melakukan aktivitas bekerja atau mencari pekerjaan.

Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 menunjukkan bahwa TPAK di Provinsi Kepulauan Riau

mengalami penurunan menjadi 68,68 persen, dari 68,94 persen pada Agustus 2022.

Gambar 4.2 TPAK di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021-2023

4.4 Penduduk yang Bekerja

Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2023 yang sebanyak 1.019.356 orang tersebar ke dalam berbagai lapangan pekerjaan.

4.4.1 Lapangan Pekerjaan

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjaannya menunjukkan pada sisi mana kegiatan ekonomi wilayah tersebut bertumpu. Lapangan pekerjaan yang dimaksud dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu Pertanian

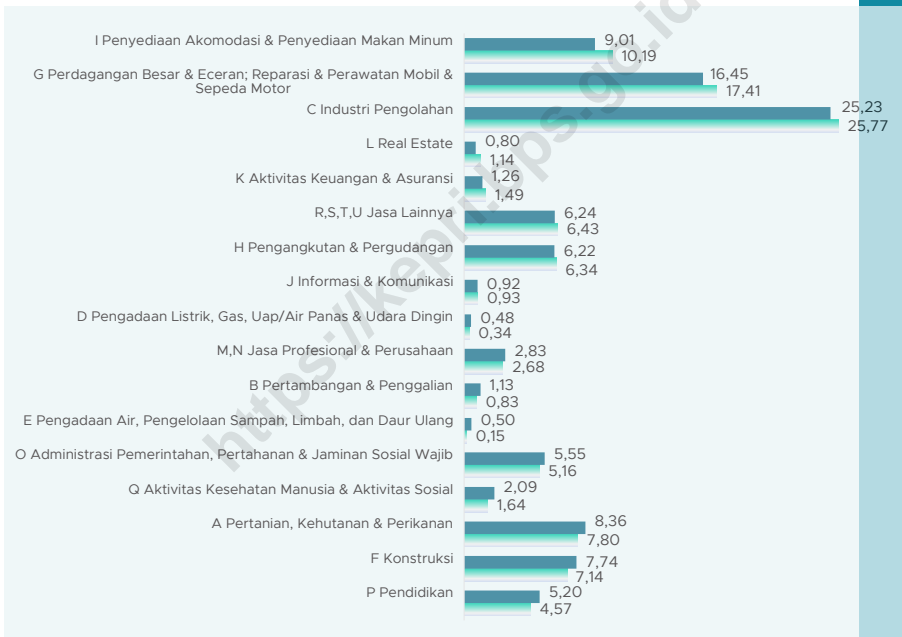
(*Agriculture*), Industri (*Manufacture*), dan Jasa (*Service*). *Agriculture* terdiri atas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan. *Manufacture* terdiri atas Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas, dan Air; serta Konstruksi. *Service* terdiri atas Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi; Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan; serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.

Kondisi ketenagakerjaan yang menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor ekonomi yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan lapangan pekerjaan tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 25,23 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menyerap tenaga kerja sebesar 16,45 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyerap tenaga kerja sebesar 9,01 persen. Secara berurutan ketiga lapangan pekerjaan tersebut menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Pendidikan (0,63 persen poin), Konstruksi (0,60 persen poin), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,56 persen poin). Sementara itu, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami

penurunan terbesar yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-1,18 persen poin), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (-0,96 persen poin), dan Industri Pengolahan (-0,54 persen poin).

Gambar 4.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2022 - Agustus 2023

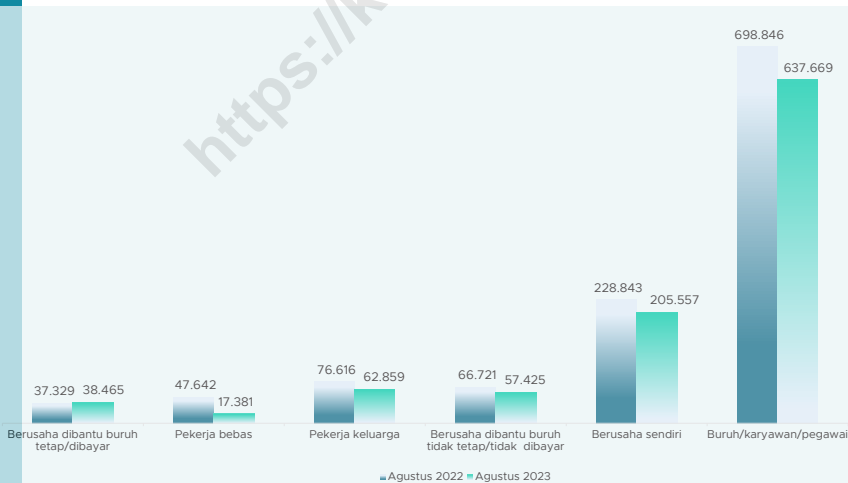


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022 dan 2023

4.4.2 Status Pekerjaan

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2023 sebesar 66,33 persen bekerja pada sektor formal dan sisanya 33,67 persen bekerja pada sektor informal.

Gambar 4.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Riau (orang), Agustus 2022 dan Agustus 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022 dan 2023

4.4.3 Jam Kerja

Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu. Sementara pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) terbagi dua yaitu, setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah pengangguran merupakan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan). Sementara pekerja paruh waktu merupakan mereka yang bekerja kurang

Gambar 4.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu (Pekerja Penuh dan Tidak Penuh) di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2022 dan Agustus 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022 dan 2023

dari 35 jam per minggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Pada Agustus 2023, pekerja penuh meningkat menjadi 80,99 persen, sedangkan setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu menurun masing-masing menjadi 4,80 persen dan 14,21 persen.

4.4.4 Pendidikan

Penyerapan tenaga kerja Agustus 2023 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sebanyak 508.653 orang (49,90 persen).

Gambar 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (orang), Agustus 2022 dan Agustus 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022 dan 2023

Kemudian dilanjutkan penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 218.548 orang (21,44 persen), penduduk bekerja berpendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 169.117 orang (16,59 persen), dan penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 123.038 orang (12,07 persen).

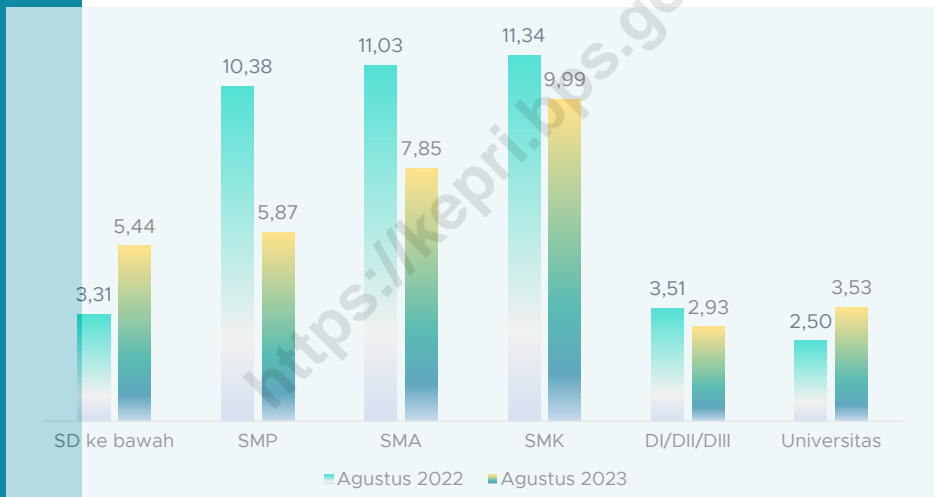
4.5 Tingkat Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2023 mencapai 74.330 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 6,80 persen atau turun sebesar 1,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Adapun jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka pengangguran dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD ke bawah dan Universitas mengalami peningkatan pada Agustus 2023, masing-masing meningkat 2,13 persen poin dan 1,03 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2022. Sementara itu, pengangguran dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP, SMA, SMK,

dan Diploma mengalami penurunan. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP, yaitu turun sebesar 4,51 persen poin dan penurunan terendah terjadi pada kelompok tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan Diploma.

Gambar 4.7 TPT Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (persen), Agustus 2022 dan Agustus 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022 dan 2023



BAB 5

Taraf dan
Pola Konsumsi





43,4%

Pengeluaran Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau untuk **Kebutuhan Makanan**

Bab 5

Taraf dan Pola Konsumsi

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Secara umum, pengeluaran per kapita penduduk per bulan untuk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022 menjadi sebesar Rp 1.989.703 dengan persentase untuk makanan 43,40 persen dan 56,60 persen untuk non makanan atau dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok; 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas, maka tingkat ketimpangan dikatakan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk angkanya sekitar 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

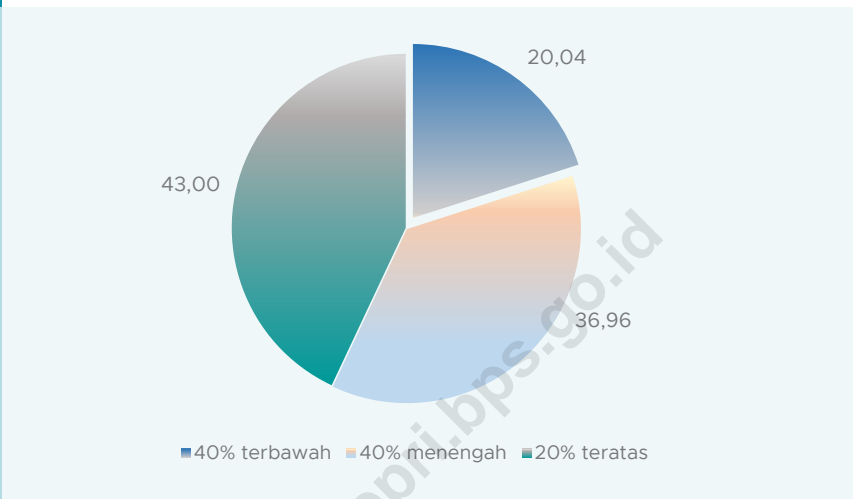
Tabel 5.1 Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Jenis Pengeluaran (1)	Pengeluaran per Kapita per Bulan	
	Nominal (Rp) (2)	Persentase (3)
Makanan	863.530	43,40
Bukan Makanan	1.126.172	56,60
• Perumahan	577.525	29,03
• Barang & Jasa	291.782	14,66
• Barang Tahan Lama	98.990	4,98
• Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	48.975	2,46
• Pajak, Pungutan dan Asuransi	48.975	2,46
• Keperluan Pesta dan Upacara	19.821	1,00
Jumlah	1.989.703	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Pada Gambar 5.1, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,04 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Sedangkan 40 persen menengah sebesar 36,96 persen, dan 20 persen teratas sebesar 43,00 persen.

Gambar 5.1 Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kuartil (persen), 2023

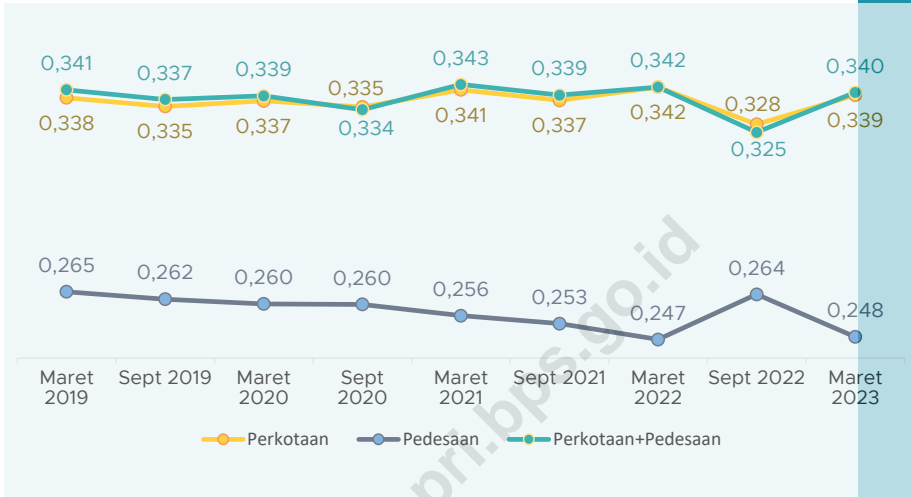


Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Ukuran lain untuk melihat sejauh mana ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan menggunakan indikator Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Nilai Gini Ratio yang semakin mendekati angka 1, menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,340 menurun 0,002 poin dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah tempat tinggal terlihat bahwa ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan, dimana nilai Gini Ratio perkotaan sebesar 0,339 sedangkan pedesaan sebesar 0,248.

Gambar 5.2 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2019-Maret 2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2023

5.2 Konsumsi Kalori dan Protein

Indikator lain yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang dihitung berdasarkan kandungan kalori dan protein makanan yang dikonsumsi penduduk. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengkonversikan kuantitas makanan yang dikonsumsi ke dalam kalori atau protein setiap komoditas makanan yang dikonsumsi kemudian dijumlahkan.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2012, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah

2.150 kkal per kapita per hari sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 adalah sebesar 57 gram per kapita per hari.

Tabel 5.2 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, 2022-2023

Daerah Tempat Tinggal	2022		2023	
	Kalori (kkal)	Protein (gram)	Kalori (kkal)	Protein (gram)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	2.026,42	65,19	2.060,67	67,64
Perdesaan	1.967,91	60,54	1.948,02	57,68
Perkotaan+Perdesaan	2.019,87	64,67	2.047,79	66,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan 2023

Pada tahun 2023, besarnya rata-rata konsumsi kalori masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2.047,79 kkal per kapita per hari. Besarnya rata-rata konsumsi tersebut berada di bawah standar kecukupan gizi menurut WNPG 2012. Selain itu, angka rata-rata konsumsi kalori menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2.019,87 kkal per kapita per hari.

Jika dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, maka terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga digunakan sebagai pendekatan terhadap

kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2023 di Kepulauan Riau sebesar 66,50 gram per kapita per hari. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu yang sebesar 64,67 gram per kapita per hari. Merujuk pada standar kecukupan gizi nasional WNPNG 2004, maka dapat dikatakan angka kecukupan protein penduduk Kepulauan Riau sudah di atas standar nasional.

Sama halnya dengan konsumsi kalori perkapita per hari, rata-rata konsumsi protein perkapita per hari penduduk di perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan (yang diukur dari pengeluaran), dimana pendapatan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Penduduk yang berpendapatan rendah cenderung memiliki keragaman pangan yang rendah. Begitu pula dari sisi kuantitas pangan yang dikonsumsi yang relatif lebih terbatas dibanding penduduk yang berpendapatan tinggi.



<https://kepri.bps.go.id>

BAB 6

Perumahan dan
Lingkungan



<https://kepri.bps.go.id>

99,79%

Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Riau
dengan **Penerangan Listrik**

Bab 6

Perumahan dan Lingkungan

6.1 Pendahuluan

Manusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah, maupun buatan manusia. Alam sekitar yang kelihatannya sangat alamiah, kadang sewaktu-waktu dapat menjadi sangat ganas. Untuk itu, manusia menciptakan tempat perlindungan berupa rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial, secara alamiah pula mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga berkumpul pulalah beberapa bangunan rumah tinggal dan terbentuklah suatu pemukiman rumah penduduk.

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sepanjang hidupnya selain kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga rumah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat terus bertahan hidup. Jika kebutuhan primer tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mereka akan sangat sulit untuk dapat hidup secara layak.

Rumah, selain sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung, baik dari hujan maupun panas, juga diperlukan untuk memberi rasa aman bagi penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Selain itu, rumah juga merupakan tempat berkumpul bagi para penghuninya, yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Lebih jauh lagi, rumah juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesejahteraan penghuninya. Beberapa fasilitas perumahan yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan tempat penampungan kotoran atau tinja.

6.2 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga serta sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya. Karenanya, kondisi rumah sangat berperan dalam menentukan tingkat kesehatan para penghuninya, rumah yang tidak sehat dapat menjadi media penularan penyakit bagi anggota rumah tangga yang menghuninya atau bahkan bagi para tetangga di sekitarnya.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah atau tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain

digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dapat dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan).

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,75 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari sama dengan 7.2 m² per anggota rumah tangga. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Bintan memiliki persentase yang tertinggi, yaitu mencapai 7,07 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/kota	Persentase Rumah Tangga dengan		
	Luas Lantai per Kapita $\leq 7,2$ m ²	Atap Layak	Dinding Tembok
	(1)	(3)	(4)
Karimun	3,25	99,48	91,16
Bintan	7,07	99,88	88,14
Natuna	2,85	98,47	48,35
Lingga	5,61	95,22	42,93
Kep. Anambas	5,32	99,67	31,45
Batam	4,68	99,69	92,11
Tanjungpinang	5,37	100,00	93,33
Kepulauan Riau	4,75	99,48	87,04

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tinggal dengan atap yang layak. Suatu rumah dikatakan memiliki atap yang layak apabila jenis atap rumah terluas adalah yang tidak beratap dedaunan atau atap lainnya. Pada tahun 2023, banyaknya rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang tinggal di rumah dengan atap yang layak mencapai 99,48 persen.

Persentase rumah tinggal dengan dinding permanen (dinding tembok) di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 87,04 persen pada tahun 2023. Jika dilihat persentasenya per kabupaten/kota, yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 31,45 persen.

6.3 Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah yang terdapat pada Tabel 6.2 akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal dan juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, serta jamban dengan tangki septik. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 99,79 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, yang berarti masih ada sebanyak 0,21 persen rumah tangga yang belum menikmati fasilitas listrik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2023, rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan air kemasan dan air ledeng (termasuk air isi ulang) sebagai sumber air minum utama sudah mencapai 82,88 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Batam merupakan satu-satunya wilayah yang angkanya sudah di atas angka provinsi, yaitu sebesar 96,07 persen. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih, yaitu yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan pompa, sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat adalah sejauh 10 meter, pada tahun 2023 tercatat sebesar 92,27 persen.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Pokok Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/kota	Persentase Rumah Tangga dengan			
	Penerangan Listrik	Air Minum Ledeng & Kemasan	Air Minum Bersih	Pembuangan Akhir Tinja Tangki Septik/IPAL
	(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	100,00	52,76	87,81	97,02
Bintan	100,00	51,11	79,58	87,93
Natuna	100,00	74,55	91,74	77,51
Lingga	97,23	52,78	76,37	75,66
Kep. Anambas	99,84	48,37	54,63	32,37
Batam	99,87	96,07	97,28	94,46
Tanjungpinang	100,00	73,35	87,62	92,59
Kepulauan Riau	99,79	82,88	92,27	91,57

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan, terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu pembuangan akhir tinja berupa tangki septik/IPAL. Pada tahun 2023, proporsi rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang pembuangan akhir tinjanya adalah tangki septik/IPAL mencapai 91,57 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang merupakan tiga tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu masing-masing sebesar 97,02 persen, 94,46 persen dan 92,59 persen, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi Kabupaten terendah, yaitu 32,37 persen.



BAB 7

Kemiskinan





5,69%

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
dikategorikan **Miskin (Maret 2023)**

Bab 7

Kemiskinan

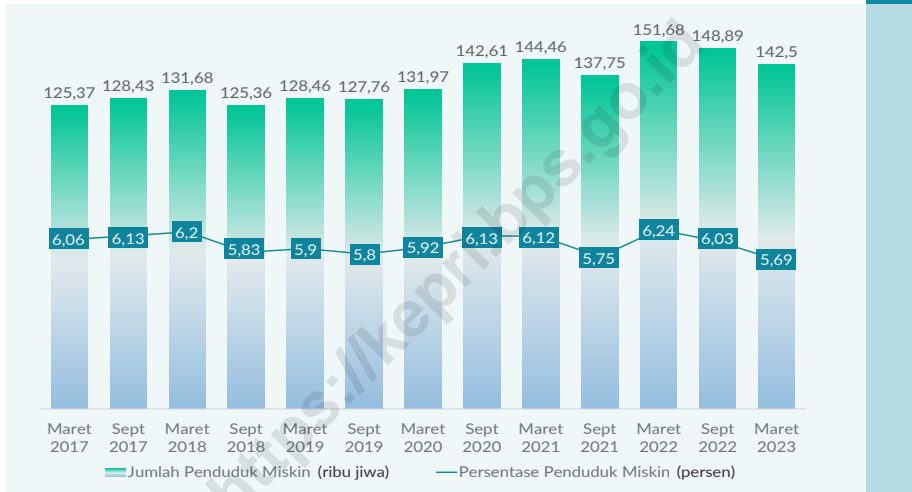
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan hasil Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023, sebanyak 5,69 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan sebesar 6,05 persen. Sementara, bila dibandingkan dengan kondisi September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 4,29 persen. Perkembangan jumlah penduduk

miskin dan angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2017- Maret 2023



Sumber: BPS, Susenas September 2017-2022 dan Maret 2017-2023

7.2 Garis Kemiskinan

Kemiskinan absolut pada umumnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Bila dibandingkan kondisi Maret 2022, Garis Kemiskinan

Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023 mengalami kenaikan sekitar 8,55 persen. Sementara itu, bila dibandingkan dengan kondisi September 2022, kenaikan Garis Kemiskinan sebesar 1,65 persen.

Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan kondisi Maret 2023 adalah sebesar 67,55 persen.

Tabel 7.1 Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021-Maret 2023

Periode	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2021	432.804	221.050	653.853
Maret 2022	458.362	225.707	684.070
September 2022	491.238	239.224	730.462
Maret 2023	501.598	240.988	742.526

Sumber: BPS, Susenas September 2021-2022 dan Maret 2022-2023

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, komoditas makanan yang menyumbang kontribusi terbesar pada Garis Kemiskinan pada daerah perkotaan adalah beras, yaitu sebesar 13,57 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, sumbangan terbesar didominasi oleh rokok kretek filter, yaitu sebesar 17,74 persen. Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan terbesar kedua, untuk daerah perkotaan adalah rokok kretek filter sebesar 9,21 dan pada perdesaan adalah beras sebesar 16,88 persen.

Tabel 7.2 Daftar Komoditi Berdasarkan Sumbangan terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen) di Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2023

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	66,62	Makanan	75,30
Beras	13,57	Rokok kretek filter	17,74
Rokok kretek filter	9,21	Beras	16,88
Daging ayam ras	5,60	Telur ayam ras	5,09
Telur ayam ras	4,18	Gula pasir	3,36
Tongkol/tuna/cakalang	2,94	Tongkol/tuna/cakalang	3,30
Cabe merah	2,84	Kue basah	3,16
Mie instan	2,66	Mie instan	3,16
Kue basah	2,28	Kue kering/biskuit	2,11
Cabe rawit	1,80	Cabe rawit	1,96
Bawang merah	1,63	Daging ayam ras	1,89
Gula pasir	1,45	Cabe merah	1,63
Lainnya	18,45	Lainnya	15,03

Tabel 7.2 (Lanjutan)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bukan Makanan	33,38	Bukan Makanan	24,70
Perumahan	10,43	Perumahan	8,07
Listrik	6,19	Listrik	4,17
Bensin	3,88	Bensin	2,49
Pendidikan	2,40	Pendidikan	1,33
Perlengkapan mandi	1,60	Perlengkapan mandi	1,24
Air	1,25	Air	0,79
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,87	Pakaian jadi anak-anak	0,77
Lainnya	6,77	Lainnya	5,85

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan, yaitu 10,43 persen di perkotaan dan 8,07 persen di perdesaan. Komoditas bukan makanan lainnya yang berpengaruh cukup besar pada GKBM, antara lain biaya yang dikeluarkan untuk listrik di urutan kedua (6,19 persen di perkotaan dan 4,17 persen di perdesaan) dan bensin di urutan ketiga (3,88 persen di perkotaan dan 2,49 persen di perdesaan). Sementara itu, komoditas yang menempati urutan keempat adalah pendidikan, yaitu sebesar 2,40 persen di perkotaan, dan 1,33 persen di perdesaan.

7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2023 mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,886 pada September 2022 menjadi 0,823 pada Maret 2023. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang turun dari 0,186 pada September 2022 menjadi 0,181 pada Maret 2023.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,705 sementara di daerah perdesaan sebesar 1,737. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,154 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,392. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021-Maret 2023

Periode	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2021	0,885	1,815	0,953
Maret 2022	1,001	1,412	1,047
September 2022	0,781	1,718	0,886
Maret 2023	0,705	1,737	0,823
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2021	0,198	0,474	0,218
Maret 2022	0,246	0,294	0,252
September 2022	0,155	0,432	0,186
Maret 2023	0,154	0,392	0,181

Sumber: BPS, Susenas September 2021-2022 dan Maret 2022-2023



BAB 8

Sosial Lainnya





86,71%

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
5 Tahun ke Atas **Mengakses Internet**

Bab 8

Sosial Lainnya

8.1 Pendahuluan

Aspek sosial lainnya yang dibahas pada bab ini utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk. Pada umumnya semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin baik, karena waktu yang ada tidak hanya digunakan untuk mencari nafkah.

8.2 Perlindungan Sosial

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan perlindungan sosial. Kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup rakyat miskin. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki dan dapat menunjukkan kartu KPS/KKS adalah sebesar 7,32 persen. Jika dirinci menurut

kabupaten/kota, maka Kabupaten Natuna adalah wilayah dengan persentase rumah tangga yang memiliki kartu KPS dan dapat menunjukkan kartu terbesar yaitu sebesar 9,17 persen. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebagai kabupaten dengan persentase terkecil yaitu 1,68 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tetapi tidak bisa menunjukkan kartu sebesar 3,23 persen.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/Kota (1)	Ya, Dapat Menunjukkan Kartu (2)	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu (3)	Tidak Memiliki (4)
Karimun	1,96	2,19	95,85
Bintan	6,94	2,37	90,69
Natuna	9,17	2,37	88,47
Lingga	9,15	4,79	86,06
Kep. Anambas	1,68	5,99	92,33
Batam	8,67	3,10	88,24
Tanjungpinang	4,04	4,87	91,10
Kepulauan Riau	7,32	3,23	89,45

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

8.3 Akses terhadap Informasi

Kegiatan masyarakat pada umumnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses pada informasi seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar, dan mengakses internet. Pada sub bab ini, hanya disajikan informasi mengenai penduduk yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.

Tabel 8.2 menunjukkan bahwa penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 86,71 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka masih didominasi oleh penduduk Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dalam mengakses internet selama 3 bulan terakhir yaitu masing-masing sebesar 91,90 persen dan 83,82 persen. Sebaliknya, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebagai wilayah dengan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir terkecil yaitu masing-masing 64,09 persen dan 69,23 persen. Kondisi tersebut memang masih dimaklumi mengingat kedua kabupaten tersebut masih belum memiliki sarana dan prasarana sinyal telekomunikasi yang memadai.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	77,75	75,72	76,76
Bintan	77,75	74,25	76,03
Natuna	80,13	76,00	78,14
Lingga	66,53	61,57	64,09
Kep. Anambas	70,78	67,57	69,23
Batam	92,39	91,40	91,90
Tanjungpinang	84,29	83,34	83,82
Kepulauan Riau	87,43	85,97	86,71

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

8.4 Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Selain dari aspek kesejahteraan yang dilihat dari kegiatan dan akses ke media massa, bab ini juga menerangkan tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga, di antaranya pada aspek yang berkaitan dengan banyaknya rumah tangga yang menerima program atau bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan rumah tangga yang menerima kredit usaha.

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/Kota	Ya	Tidak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	3,14	96,86	100,00
Bintan	9,82	90,18	100,00
Natuna	11,40	88,60	100,00
Lingga	14,69	85,31	100,00
Kep. Anambas	9,54	90,46	100,00
Batam	8,95	91,05	100,00
Tanjungpinang	10,85	89,15	100,00
Kepulauan Riau	8,94	91,06	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Hasil Susenas Maret 2023, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 8,94 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau penerima PKH dalam setahun terakhir. Jika dilihat persentase antarkabupaten/kota, hampir semua kabupaten/kota memiliki nilai persentase rumah tangga penerima PKH diatas angka provinsi Kepulauan Riau, kecuali Kabupaten Karimun yaitu hanya 3,14 persen. Persentase rumah tangga penerima PKH tiga terbesar berturut-turut adalah Kabupaten Lingga (14,69 persen), Kabupaten Natuna (11,40 persen), dan Kota Tanjungpinang (10,85 persen).

Dari sekitar 8,94 persen rumah tangga yang menyatakan pernah menerima PKH dalam setahun terakhir, 83,67 persennya menyatakan saat ini masih tercatat sebagai penerima program, sedangkan 14,49 persen menyatakan tidak tercatat lagi dan 1,84 persen menyatakan tidak tahu. Dari 83,67 persen rumah tangga yang saat ini masih tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan, sebanyak 27,00 menerima bantuan PKH di ATM, 26,95 persen di agen Bank, 26,00 persen di kantor pos, sekitar 16,33 persen di pendamping/ketua kelompok, dan 3,72 persen di kantor Bank.

Tabel 8.4 menunjukkan bahwa 18,05 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau pernah menerima kredit usaha dalam

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Pernah dan Tidak Pernah Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

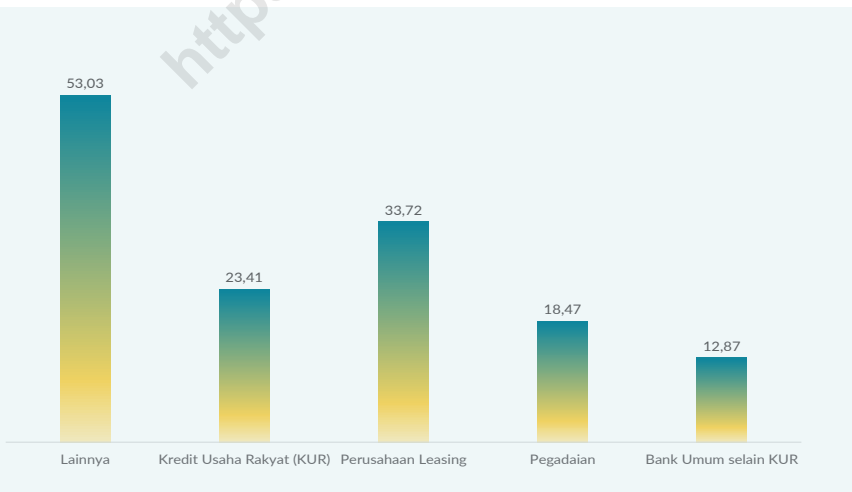
Kabupaten/Kota	Pernah	Tidak Pernah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	8,46	91,54	100,00
Bintan	24,25	75,75	100,00
Natuna	11,88	88,12	100,00
Lingga	15,92	84,08	100,00
Kep. Anambas	16,21	83,79	100,00
Batam	19,41	80,59	100,00
Tanjungpinang	18,60	81,40	100,00
Kepulauan Riau	18,05	81,95	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

setahun terakhir. Persentase tertinggi adalah Kabupaten Bintan yaitu sebesar 24,25 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Karimun yaitu sebesar 8,46 persen.

Jika dilihat menurut jenis kredit, kredit yang diterima oleh rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau berasal dari berbagai sumber, yaitu bersumber dari perusahaan leasing yaitu sebesar 33,72 persen, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 23,41 persen, pegadaian sebesar 18,47 persen, Bank Umum selain KUR sebesar 12,87 persen, dan kredit lainnya (koperasi, BPR, perorangan dengan bunga, Bumdes, pinjaman online, dll) sebesar 53,03 persen.

Gambar 8 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Jenis Kredit di Provinsi Kepulauan Riau, 2023



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

8.5 Tindak Kejahatan

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat terganggu jika mengalami korban tindak kejahatan. Secara umum dari Tabel 8.5 menunjukkan bahwa sebanyak 0,88 persen penduduk di Kepulauan Riau pada tahun 2023 menjadi korban tindak kejahatan selama setahun terakhir. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan terbanyak adalah di Kota Batam yaitu sebesar 1,13 persen, dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Lingga dimana tidak terdapat korban kejahatan pada tahun 2023.

Tabel 8.5 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	0,77	0,54	0,65
Bintan	0,65	0,10	0,38
Natuna	0,00	0,13	0,06
Lingga	0,00	0,00	0,00
Kep. Anambas	0,32	0,00	0,17
Batam	0,82	1,44	1,13
Tanjungpinang	0,53	0,38	0,46
Kepulauan Riau	0,71	1,05	0,88

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020". <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/1/11/0>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. "Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) 2021-2023". <https://kepri.bps.go.id/indicator/26/666/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. "Rata-rata Lama Sekolah (tahun), 2021-2023". <https://kepri.bps.go.id/indicator/26/181/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. "Harapan Lama Sekolah (tahun), 2021-2023". <https://kepri.bps.go.id/indicator/26/180/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html>.
- Badan Pusat Statistik. "Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 (Tahun), 2022-2023". <https://kepri.bps.go.id/indicator/26/666/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023". <https://kepri.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/1461/tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk--provinsi-kepulauan-riau--maret-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. "Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023". <https://kepri.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/1459/profil-kemiskinan-provinsi-kepulauan-riau-maret-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. "Keadaan Ketenagakerjaan Kepulauan Riau Agustus 2023". <https://kepri.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/1467/keadaan-ketenagakerjaan-kepulauan-riau-agustus-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2022. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2022. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau September 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2022. Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2022. Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2022. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2023. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020-2035. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2023. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

LAMPIRAN

<https://jabri.bps.go.id>

Lampiran 1 *Sampling Error* Indikator

Nama Indikator	Nilai Estimasi	RSE
(1)	(2)	(3)
Angka kesakitan menurut kabupaten/kota		
- Karimun	10,18	10,64
- Bintan	6,56	12,44
- Natuna	7,63	14,44
- Lingga	10,08	12,03
- Kep. Anambas	6,91	11,71
- Batam	10,68	8,76
- Tanjungpinang	8,68	12,51
Persentase baduta yang pernah diberi ASI menurut kabupaten/kota		
Laki-laki		
- Karimun	96,16	3,94
- Bintan	84,36	13,39
- Natuna	97,12	2,97
- Lingga	100,00	0,00
- Kep. Anambas	83,38	14,93
- Batam	93,84	3,94
- Tanjungpinang	95,80	4,33
Perempuan		
- Karimun	94,61	3,45
- Bintan	94,72	3,94
- Natuna	66,45	18,31
- Lingga	85,29	11,51
- Kep. Anambas	84,50	10,93
- Batam	94,06	3,45
- Tanjungpinang	93,39	7,04

Lampiran 1. (lanjutan)

Nama Indikator	Nilai Estimasi	RSE
(1)	(2)	(3)
Laki-laki+Perempuan		
- Karimun	95,27	2,58
- Bintan	90,47	6,24
- Natuna	80,70	9,23
- Lingga	93,26	5,05
- Kep. Anambas	83,99	9,04
- Batam	93,94	2,65
- Tanjungpinang	94,52	4,04
Persentase balita yang pernah diimunisasi menurut kabupaten/kota		
BCG		
- Karimun	83,51	5,02
- Bintan	80,16	4,77
- Natuna	80,49	4,54
- Lingga	80,50	5,30
- Kep. Anambas	69,25	7,08
- Batam	86,27	2,95
- Tanjungpinang	83,76	5,30
Polio		
- Karimun	77,52	5,91
- Bintan	74,74	5,59
- Natuna	73,67	5,94
- Lingga	75,97	5,97
- Kep. Anambas	66,00	7,95
- Batam	86,60	2,92
- Tanjungpinang	76,22	7,52

Lampiran 1. (lanjutan)

Nama Indikator	Nilai Estimasi	RSE
(1)	(2)	(3)
DPT		
- Karimun	82,03	5,18
- Bintan	74,13	6,62
- Natuna	77,48	5,16
- Lingga	76,06	6,15
- Kep. Anambas	64,93	8,13
- Batam	83,96	3,58
- Tanjungpinang	79,01	6,16
Campak		
- Karimun	67,82	7,15
- Bintan	65,91	7,12
- Natuna	66,17	7,25
- Lingga	63,50	8,33
- Kep. Anambas	55,13	9,62
- Batam	77,84	3,92
- Tanjungpinang	74,96	6,44
Hepatitis B		
- Karimun	76,75	6,02
- Bintan	70,81	8,27
- Natuna	74,85	5,86
- Lingga	74,24	6,22
- Kep. Anambas	63,41	8,41
- Batam	87,04	3,04
- Tanjungpinang	76,54	7,49

Lampiran 1. (lanjutan)

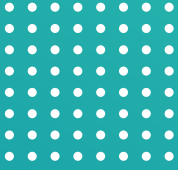
Nama Indikator	Nilai Estimasi	RSE
(1)	(2)	(3)
Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki		
- Tidak mempunyai ijazah	4,91	8,89
- SD/Sederajat	16,02	4,82
- SMP/Sederajat	18,57	4,68
- SMA/Sederajat	46,46	2,49
- Perguruan Tinggi	14,03	5,55
APS formal dan informal menurut kelompok umur		
- 7-12	99,29	0,32
- 13-15	99,07	0,51
- 16-18	84,97	3,19
APM formal dan informal menurut tingkat pendidikan		
- SD	99,29	0,32
- SMP	86,78	2,53
- SMA	74,11	4,21
Persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dengan sumber air minum bersih		
- Karimun	87,81	1,77
- Bintan	79,58	2,82
- Natuna	91,74	1,65
- Lingga	76,37	2,86
- Kep. Anambas	54,63	5,02
- Batam	97,28	0,82
- Tanjungpinang	87,62	1,97

Lampiran 1. (lanjutan)

Nama Indikator	Nilai Estimasi	RSE
(1)	(2)	(3)
Persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dengan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik/IPAL		
- Karimun	97,02	0,91
- Bintan	87,93	2,17
- Natuna	77,51	2,98
- Lingga	75,66	3,01
- Kep. Anambas	32,37	8,23
- Batam	94,46	1,13
- Tanjungpinang	92,59	1,28
Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet menurut kabupaten/kota		
- Karimun	76,76	2,03
- Bintan	76,03	1,93
- Natuna	78,14	2,07
- Lingga	64,09	2,62
- Kep. Anambas	69,23	2,36
- Batam	91,90	1,32
- Tanjungpinang	83,82	1,41
Persentase rumah tangga penerima KKS menurut kabupaten/kota		
- Karimun	4,15	22,36
- Bintan	9,31	17,72
- Natuna	11,53	16,45
- Lingga	13,94	12,76
- Kep. Anambas	7,67	20,48
- Batam	11,76	13,39
- Tanjungpinang	8,90	15,07

Lampiran 1. (lanjutan)

Nama Indikator	Nilai Estimasi	RSE
(1)	(2)	(3)
Persentase rumah tangga penerima PKH menurut kabupaten/kota		
- Karimun	3,14	25,29
- Bintan	9,82	15,95
- Natuna	11,40	15,55
- Lingga	14,69	12,19
- Kep. Anambas	9,54	17,14
- Batam	8,95	15,61
- Tanjungpinang	10,85	14,19
Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut komoditas		
- Makanan	863.530	2,64
- Bukan Makanan	1.126.172	4,71
Rata-rata konsumsi per kapita per hari menurut kandungan makanan		
- Kalori	2.047,79	1,29
- Protein	66,50	1,68



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi, Pelanggaran, Keadaban, Kompetensi,
Berharmoni, loyal, adaptif, kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124
Telp: (0771) 4500155

Homepage: kepri.bps.go.id Email: bps2100@bps.go.id

